

Pemprov DKI Tetapkan Gedung Bappenas Sebagai Cagar Budaya

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI resmi menetapkan Gedung Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai bangunan cagar budaya DKI Jakarta.

Kepala Disbud DKI, Iwan Henry Wardhana mengatakan, bangunan tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya karena menggambarkan sejarah perencanaan pembangunan nasional bagi kemajuan bangsa yang terjadi dalam sejarah Ibu Kota. Bangunan tersebut juga merupakan warisan pemerintah Belanda.

"Penetapan gedung utama badan perencanaan pembangunan nasional sebagai bangunan cagar budaya ini menjadi penting karena selain pernah menjadi tempat Dewan Peranteng Nasional sejak tahun 1962, gedung ini juga merupakan tempat Mahkamah Militer Luar Biasa Pascaperistiwa G-30-S PKI pada 1966," kata Iwan di Jakarta, Jumat (19/8).

Dia menjelaskan, pencatatan karya budaya diharapkan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya dan menjadi identitas komunal alias milik rakyat.

Selain itu, Iwan melanjutkan, kebijakan tersebut juga berhubungan dengan pentingnya perlindungan warisan budaya Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat keadulatan dan memajukan ekonomi masyarakat.

"Hal ini ditujukan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus perwujudan ketahanan nasional," kata Iwan.

Bangunan Cagar Budaya ditetapkan setelah melalui proses kajian yang dilakukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta pada 2 November 2022 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor 318 Tahun 2023 tentang Penetapan Gedung Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagai Bangunan Cagar Budaya pada 8 Mei 2023.

● yan

Pemkab Bekasi Lakukan Penataan Pasar Cikarang

KABUPATEN BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai melakukan penataan jangka pendek Pasar Cikarang melalui skema pemindahan pedagang kaki lima demi keamanan, kenyamanan, serta ketertiban umum.

"Langkah jangka pendek dengan menertibkan pedagang kaki lima di area Jalan Kapten Sumantri atau simpang Sentra Grosir Cikarang dengan beberapa alternatif," kata Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo di Cikarang, Jumat (19/5).

Ia mengatakan para pedagang kaki lima yang selama ini membuka lapak di area tersebut akan ditampung di akses masuk terminal lama atau kompleks bangunan Sentra Grosir Cikarang.

Kemudian bagi pedagang yang berjualan di badan jalan dan tidak eksis seperti pedagang sayur pada malam hari akan diberikan batas waktu hingga pagi hari.

"Dengan penataan ini diharapkan para pedagang tidak mengganggu jalan utama, yakni Jalan Kapten Sumantri dan Jalan RE Martadinata," ucapnya.

Penataan jangka pendek ini sekaligus bertujuan memberikan kenyamanan kepada para pembeli saat melakukan transaksi dengan pedagang kaki lima dimaksud.

"Termasuk urusan kebersihan dan area parkir di area tersebut, jadi penataan dilakukan secara gotong royong melibatkan beberapa unsur terkait," katanya.

Gatot mengaku telah berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Satpol PP, Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan. Setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing se-

suai standar operasional agar penataan pasar yang menjadi sentra ekonomi masyarakat itu berjalan optimal.

"Kami sudah melakukan uji coba. Kami bersama DLH (Dinas Lingkungan Hidup) mengangkut tumpukan sampah di jalan bekas akses terminal lama. Sehingga lahan bekas tumpukan sampah saat ini sudah bersih terangkut ke TPA Burangkeng dan sudah bisa ditempati para pedagang yang selama ini pindah ke jalan utama," ucapnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya mengatakan pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap jumlah bangunan liar yang berada di wilayah sekitar Pasar Cikarang.

"Kami akan lakukan secara persuasif dengan para paguyuban pedagang. Berkomunikasi kapan waktu buka dan tutup lapak. Jadi, diatur sebagaimana untuk menciptakan ketertiban umum," ucapnya.

Satpol PP Kabupaten Bekasi bertekad menata wilayah Pasar Cikarang menjadi lebih baik. Surya yakin dengan sinergi serta kekompakan perangkat daerah terkait, Pasar Cikarang bisa menjadi ikon Kabupaten Bekasi.

"Semoga dengan kekompakan yang sudah terjalin ini bisa memaksimalkan penataan Pasar Cikarang. Kondisi lalu lintas juga dapat teratur dengan baik dan kami (Satpol PP) melakukan penertiban, dinas pasar menata pedagang," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deny Hendra Kurniawan mengatakan jalan di area Pasar Cikarang berstatus jalan nasional dan kabupaten.

Pihaknya telah mengagagas studi kelayakan untuk menata area itu, termasuk pembuatan akses jalur sepeda dan pedestrian dari arah Terminal Kalijaya hingga Stasiun Cikarang.

"Kami juga berharap ada kemanfaatan dari penataan Pasar Cikarang. Bermanfaat bagi warga, terlihat indah, serta menjadi aspek pendukung pertumbuhan ekonomi," kata dia. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



PERINGATAN 25 TAHUN REFORMASI

Sejken Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Pius Lustrilang (kanan), aktivis Aldera Bandung Valentina Sagala (kedua kanan), aktivis Aldera Bogor Teddy Wibisana (kedua kiri) dan aktivis Aldera Jakarta Taufan Hunneman (kiri) mengangkat buku berjudul Aldera: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999 saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (19/5). Memperingati 25 Tahun Reformasi, Aldera menyelenggarakan kuliah umum dan bedah buku di 37 kampus seluruh Indonesia dalam rangka mengajak kaum muda menjaga demokrasi.

Plt Kadinkes DKI Bikin Laporan ke Inspektorat Soal Bawahannya Pamer Gaji

Jajaran Dinkes DKI akan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2022 milik Ngabila di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya Rp 73,188 juta. Padahal gaji yang diungkapkannya di media sosial sebesar Rp 34 juta per bulan. Langkah klarifikasi itu agar masalah Ngabila bisa dituntaskan.

JAKARTA (IM) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, pihaknya telah memanggil Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunitas Dinkes DKI, Ngabila Salama atas masalah pamer gaji di media sosial (medsos).

Tindakan Ngabila tersebut viral dan menjadi perbincangan warganet, khususnya kalangan dokter.

Ani mengaku, segera membuat laporan untuk disampaikan ke Inspektorat DKI Jakarta. "Baru saja kita klarifikasi ke yang bersangkutan. Nanti kita rumuskan

antara jawabannya dan postingan-postingan yang ada dan aturan-aturan yang ada," kata Ani, Jumat (19/5).

Ani menjelaskan, memang ada aturan bagi ASN mengenai disiplin kode etik. Dia mengatakan, dari hasil meminta keterangan dan bukti masalah yang viral di medsos, pihaknya akan telah melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan.

"Karena memang di ASN ada aturan disiplin tentang kode etik, nanti disesuaikan dengan aturan yang ada sebenarnya di sisi mana yang dilanggar. Nanti kita rumuskan dulu ya supaya enggak salah," tutur Ani.

Karena itu, pihaknya akan melaporkan status pamer gaji ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI dan Inspektorat

DKI sekaligus agar dua lembaga tersebut langsung menindaklanjutinya. Hal itu juga sekaligus merespon Instruksi Gubernur (Ingub) yang diteken Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono yang meminta ASN hidup sederhana dan tidak pamer.

"Kita sedang membina yang bersangkutan. Dan habis itu akan bikin laporan terkait kejadian itu ke BKD dan Inspektorat," ucap Ani.

Jajaran Dinkes DKI, sambung dia, juga akan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2022 milik Ngabila di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya Rp 73,188 juta. Padahal gaji yang diungkapkannya di media sosial sebesar Rp 34 juta per bulan. Langkah klarifikasi itu

agar masalah Ngabila bisa dituntaskan.

Sebelumnya, jagat lini masa Twitter dihebohkan dengan pengakuan pegawai negeri sipil (PNS) Dinkes DKI dokter Ngabila Salama, yang mengaku kenal dekat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, ia pamer memiliki pendapatan atau take home pay (THP) sebesar Rp 34 juta per bulan.

Status itu kini memang sudah dihapus dan Ngabila sudah meminta maaf. Namun, status tersebut seperti membuat gerah dan gram para dokter sejawatnya. Alhasil, tangkapan layar status Ngabila terus beredar dan viral di berbagai kanal media sosial (medsos). ● yan

Heru Budi Minta Jajarannya Selesaikan Masalah Ruko Serobot Bahu Jalan

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan sudah meminta jajarannya untuk turun tangan menyelesaikan masalah dugaan adanya puluhan ruko serobot bahu jalan.

Dugaan penyerobotan bahu jalan dan saluran air yang merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum itu oleh deretan rumah toko (ruko) itu terjadi di Jalan Niaga RT 011/RW 03 Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Sesuai aturan saja, kalau sesuai aturan ada IMB nya seperti itu. Saya sudah minta Dinas Citata, Kasatpol PP, Wali Kota Jakarta Utara untuk meneliti itu dan sudah dicek," kata Heru Budi saat menghadiri Acara Gerakan Menanam di Duran Sawit, Jakarta Timur, Jumat (19/5).

Heru Budi juga mengungkapkan bahwa pada hari ini Wali Kota Jakarta Utara akan menemui para pemilik ruko yang diduga menyerobot bahu jalan serta menutup saluran air untuk mendirikan bangunan.

Selanjutnya, ia berharap para pemilik ruko tersebut agar membongkar sendiri bangunannya yang telah melanggar aturan.

"Hari ini Pak Wali Kota beserta jajarannya mengundang pihak-pihak yang memang harus dilakukan pembongkaran sendiri. Saya harapkan mereka bongkar sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua RT 011/RW 03 Pluit Riang Prasetya mempersoalkan adanya bangunan ruko yang menempati ruang Jalan Niaga, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, yang semula diperuntukkan bagi fasilitas

sosial dan umum (fasos dan fasum).

Total jumlah ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang dipersoalkan oleh Ketua RT tersebut berjumlah 42 unit. Ruko tersebut berada di Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan.

Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim sendiri sudah menggelar rapat Pemkot Jakarta Utara bersama dengan PT Jawa Barat Indah (JBI) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membahas masalah ini.

Pihak PT JBI dan PT Jakpro turut dilibatkan dalam rapat tersebut karena JBI merupakan pengembang ruko. Sedangkan Jakpro yang dulunya Badan Pengelola Lahan (BPL) Pluit merupakan pihak yang menerima lahan yang telah diserahkan PT JBI untuk fasos-fasum. ● yan

Bayi Dibuang di Pinggir Jalan Jadi Rebutan Pasutri untuk Adopsi

TANGERANG (IM) - Sebanyak tujuh pasangan suami istri (Pasutri) telah terkonfirmasi ingin mengadopsi bayi laki-laki yang ditemukan di dalam kardus pinggir jalan Kampung Kutruk, Desa Kutruk, Kecamatan Jambé, Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal tersebut disampaikan Kapolsek Tigaraksa, AKP Agus Ahmad Kurnia. Kata dia, pasangan tersebut mengkonfirmasi berniat mengadopsi bayi tersebut lewat telepon dan datang langsung ke Polsek Tigaraksa.

"Tujuh pasangan suami istri yang ingin adopsi itu anak udah 7 orang, ada dari Jatiuwung datang ke Polsek," ujarnya, Jumat (19/5).

"Sekiranya tujuh pasangan yang datang ke Polsek sudah dua pasangan yang telpon Kapolsek udah dua orang yang datang langsung puskesmas, ya ada sekitar tujuh pasangan lah," tambahnya.

Kendati dia tidak dapat memberikan keputusan. Sebab, kewenangan kepolisian hanya untuk penyelidikan saja.

Menurutnya, yang dapat memutuskan untuk adopsi adalah Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang dan pengadilan. Meski begitu, untuk mengadopsi bayi tersebut membutuhkan waktu, lantaran kasusnya masih proses penyelidikan.

"Tapi kan kita gak bisa memutuskan, yang bisa memutuskan itu kan dari Dinsos, dari Dinsos kan nanti akan cek faktor ekonomi bagaimana, faktor latar belakang keluarga itu dari mana, kan begitu, nanti surat adopsinya lewat pengadilan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bayi laki-laki yang baru lahir ditemukan oleh warga di dalam kardus pinggir jalan Kampung Kutruk, Desa Kutruk, Kecamatan Jambé,

Kabupaten Tangerang, Banten.

Kapolsek Tigaraksa, AKP Agus Ahmad Kurnia mengatakan bayi tersebut ditemukan oleh pegawai desa saat melintas di jalan kampung tersebut RT 6 RW 3 pada Selasa (17/5).

"Pegawai desa abis beli makan dia arah pulang dia ngedenger suara bayi nangis di dalam kardus di pinggir jalan kampung itu RT 6 RW 3," ujarnya.

Pegawai desa itu kemudian mengecek kardus tersebut dan ternyata ada bayi di dalamnya. Dia pun langsung melaporkan ke kepala desa untuk kemudian mengevakuasi bayi tersebut.

"Langsung cek ternyata benar di dalam kardus itu ada bayi laki-laki masih hidup di bawa ke bidan desa, di bawa di bersihkan kasih susu lalu di bawa ke puskesmas Jambé terus di puskesmas Jambé di rawat hari ini di serahkan ke Dinsos untuk bayinya," jelasnya.

Dia menuturkan diperikrakan bayi itu baru beberapa jam dilahirkan oleh ibunya dan langsung ditelantarkan. Saat ditemukan bayi itu dalam keadaan sehat.

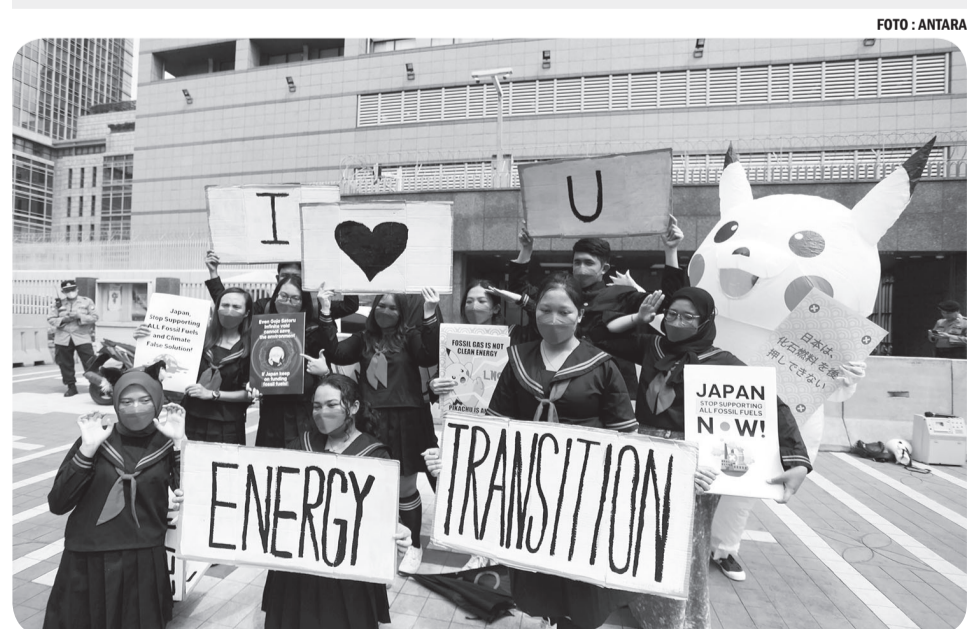
"Belum ada sebulan, paling sejam dua jam baru lahir itu. Kalo ari-ari udah gak ada, tali pusar

Agus menduga, bayi itu sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya karena ingin ditemukan oleh orang lain untuk diurus. Sebab, ketika ditemukan bayi itu terbalut kain. Kemudian, kardus tempat bayi itu juga terbuka.

Pihaknya pun saat ini masih menyelidiki terkait kasus penelantaran bayinya. Sejumlah alat bukti telah diamankan. Bayi tersebut pun kini telah diserahkan ke puskesmas. Rencananya, hari ini akan disrtke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang. ● pp

PENGUMUMAN
PT MAJU JAYA BERSATU, Berkedudukan di Jakarta Selatan, ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan keseluruhan saham (akuisisi) Perseroan yang dimiliki oleh Tuan KSHINCHAND NARAINDAS NATHANI kepada Tuan YISHAL KUMAR.
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor Perseroan atau pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:
PT MAJU JAYA BERSATU
Jalan Ciledug Raya Nomor 7, Kelurahan Uluwami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12250
Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 20 Mei 2023
Direksi
PT MAJU JAYA BERSATU

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN
Direksi PT Borneo Lestari Cemerlang ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui pengambilalihan saham secara langsung dari para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), yang mana rencana tersebut akan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan dan perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan ("Rencana Pengambilalihan").
Keberatan atas Rencana Pengambilalihan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan pada alamat di bawah ini, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman ini.
Demikian pengumuman ini disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) UUPT dan agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Jakarta, 20/05/2023
Direksi Perseroan



AKSI MENGHENTIKAN PENDANAAN ENERGI FOSIL

Sejumlah pegiat iklim dari masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Jumat (19/5). Mereka mendesak pemerintah Jepang dan negara-negara G7 menghentikan pendanaan energi fosil termasuk energi panas bumi (LNG) karena eksplorasi energi fosil dapat merusak lingkungan.